

► BANTUAN HIBAH

"BPK Bisa Periksa Penerima Bantuan"

BALAI KOTA—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai bisa turun tangan menyikapi gelapnya laporan pertanggungjawaban (LPj) hibah dan bantuan sosial (bansos) 2012 senilai Rp1 miliar.

Penerima hibah bahkan dapat diseret ke jalur hukum jika terbukti menyelewengkan dana bantuan. Hal itu dilontarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, saat ditemui wartawan di Balai Kota, Senin (8/7). "Secara regulasi, BPK bisa memanggil penerima hibah," ujarnya.

Sekda menyebut naskah perjanjian hibah (NPH), proposal berikut bukti transfer cukup menjadi landasan BPK mengusut kemungkinan penggelapan dana. Dia menilai warga yang menolak menyerahkan LPj bisa dikategorikan melawan perjanjian.

"Apakah itu masuk delik korupsi atau tidak, biar BPK yang memutuskan. Yang jelas kemungkinan pidana

terbuka jika mereka terbukti korupsi," cetusnya.

Budi memaparkan sejauh ini LPj yang belum tertagih tinggal Rp800 juta. Pihaknya mengakui sejumlah LPj yang belum disetor berasal dari lembaga atau yayasan yang telah gulung tikar. Sekda siap mempertajam pengawasan untuk menghindari yayasan abal-abal meraih bantuan. "Ada indikasi mereka membentuk lembaga cuma untuk meraih bansos, setelah itu hilang. LPj-nya jadi tidak jelas."

Sebagai langkah jangka panjang, Pemkot bakal mengurangi jatah dana bansos tiap tahunnya. Tahun ini kebijakan itu telah dimulai dengan hanya menganggarkan Rp4,3 miliar dari sebelumnya Rp7 miliar. Budi menilai duit bansos lebih efektif dialihkan ke urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan. "Bukan dicoret, tapi dialihkan ke belanja langsung yang lebih menjadi kebutuhan

primer," ucapnya.

Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, mengaku siap memberi sanksi bagi penerima hibah yang membandel. Sanksi tersebut berupa *blacklist* sementara lembaga dari daftar penerima hibah. Rudy berharap langkah itu bisa menjadi pembelajaran warga untuk lebih tertib administrasi. "Sebelum mendapat bantuan lagi, penerima harus disanksi dulu. Detailnya seperti apa nanti kami panggil satu-satu," terangnya.

Pihaknya memberi tenggat hingga akhir 2013 untuk penerima hibah merampungkan kewajibannya. Rudy menyebut ketaatan warga sangat berpengaruh terhadap penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). Selama ini Pemkot jarang absen meraih predikat tersebut.

"Nanti kami akan memberi pendampingan membuat LPj bersama Inspektorat. Harapannya sebelum 2013 masalah ini bisa rampung," pungkasnya. (Chrisna Ghonis Cara)